

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Informal

1. Pengertian

Pendidikan informal adalah proses belajar sepanjang hayat yang terjadi pada setiap individu dalam memperoleh nilai-nilai, sikap, keterampilan dan pengetahuan melalui pengalaman sehari-hari atau pengaruh pendidikan dan sumber lainnya di sekitar lingkungannya. Hampir semua bagian prosesnya relatif tidak terorganisasikan dan tidak sistematis. Meskipun demikian, tidak berarti hal ini menjadi tidak penting dalam proses pembentukan kepribadian.¹

Pendidikan dapat kita ambil dalam pembelajaran aspek-aspek dilingkungan sekitar, dapat terjadi dimana-mana dan kapan saja, dapat terjadi di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama karena pendidikan yang baik akan membawa pengaruh pendidikan terhadap perubahan kemajuan bagi negara, kemajuan dalam seluruh aspek bidang yang ada. Tanggung jawab bersama dalam pendidikan dimulai antara keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah yang dalam pelaksanaannya diusahakan secara bersama terutama oleh orang tua, guru dan masyarakat sekitar.

2. Dasar Pendidikan Informal

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Demikian pula dasar pendidikan Islam yaitu

¹ Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya Offset,2012), 137.

fondamen yang menjadi landasan atas asas agar pendidikan Islam dapat tegak berdiri tidak mudah roboh karena tiupan angin kencang berupa ideologi yang muncul baik sekarang maupun yang akan datang.² Undang-undang Sisdiknas, Bagian keenam tentang Pendidikan Informal, Pasal 27 berbunyi bahwa:

- a. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- b. Hasil pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- c. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.

3. Tujuan Pendidikan Informal

Menurut Suardi, tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Sedangkan menurut Islam, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia supaya sehat, cerdas, patuh, dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi larangan- larangannya.³

Tujuan pendidikan yang dikehendaki Al-Qabisi adalah agar pendidikan dan pengajaran dapat menumbuh kembangkan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Al-Qabisi juga menghendaki tujuan pendidikan yang mengarah agar anak memiliki keterampilan dan keahlian pragmatis yang dapat mendukung mencari nafkah. Ini diberikan setelah memperoleh pendidikan

² Romlah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (FAKTA Press Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2009), h.23

³ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Islam Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), h. 73-74.

agama dan akhlak dengan harapan dalam mencari nafkah atau bekerja di dasari rasa takut kepada Allah SWT.⁴

Sekalipun tidak ada tujuan pendidikan informal yang dirumuskan secara tersurat, tetapi secara tersirat dipahami bahwa tujuan pendidikan informal pada umumnya adalah agar anak menjadi pribadi yang sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, beragama, bermoral, dan menjadi masyarakat yang baik. Fungsi pendidikan informal adalah: “Sebagai letak dasar pendidikan anak, dan Sebagai dasar persiapan menuju ke arah kehidupan yang lebih baik bersosial, beragama bernilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar kelak dalam bermasyarakat akan diterima dengan baik oleh lingkungan masyarakat sekitarnya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan informal adalah tujuan dalam pendidikan untuk membentuk watak dan kepribadian seseorang individu dengan nilai-nilai luhur yang ada untuk kehidupan nantinya di masyarakat.

4. Jenis Pendidikan Informal

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.⁵ Pendidikan secara individual yang dilakukan sendiri oleh seorang individu menangkap sendiri fenomena yang ada di lingkungan sekitarnya untuk dipelajari lebih lanjut dan dapat dikembangkan lagi nantinya, dari pengertian tersebut ada dua hal yang menjadi sentranya pendidikan informal, pertama keluarga, kedua lingkungan.⁶

⁴ Abd Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), h. 66.

⁵ UU RI No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab1 Pasal 1Ayat 13.

⁶ Ahmad Darlis, Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal. *Jurnal Tarbiyah* 26, no. 1, (2017): 86.

a. Keluarga

Keluarga tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa pusat pendidikan tertua dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Pendidikan yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.⁷ Dari keluargalah seorang individu memulai pembelajarannya menangkap fenomena pertama yang ada dalam kehidupannya memulai pendidikan yang nantinya akan digunakan terjun ke lingkungan sekitar yang sudah dipelajari dalam keluarga terlebih dahulu, sehingga bisa memuali dalam bersosialnya di lingkungan yang baru.

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Dalam lingkungan keluarga, anak pertama-tama mendapatkan berbagai pengaruh (nilai). Oleh karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Ayah dan ibu dalam keluarga sebagai pendidikannya, dan anak sebagai si terdidiknya. Jika karena suatu hal anak terpaksa tidak tinggal di lingkungan keluarga yang hidup bahagia, anak tersebut masa depannya akan mengalami kesulitan-kesulitan baik di sekolah, masyarakat, maupun kelak sebagai suami istri di dalam lingkungan keluarga.

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian anak. Di dalam keluarga anak pertamakali berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan,

⁷ Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009),178-179

nilai-nilai moral, norma sosial dan pandangan hidup yang diperlukan anak.⁸ Selain hal tersebut, keluarga juga memegang peranan penting dan pengaruh yang besar terhadap kemampuan dan pengalaman manusia, terutama dalam sosialisasi yang terjadi di dalamnya.

Dalam keluarga terdapat tiga tujuan sosialisasi, yaitu interaksi di dalam keluarga, mengajarkan tentang penguasaan diri, nilai-nilai, dan peranan-peranan sosial.⁹ Jadi bermula awalan pendidikan seorang individu yang utama di lakukan dalam lingkungan keluarga, untuk memulai belajar karakter, agama tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri.

b. Lingkungan

Lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa- peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada anak yaitu lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung dan lingkungan dimana anak-anak bergaul sehari-hari.¹⁰ Pengertian lingkungan tersebut memberikan pemahaman bahwa lingkungan mempengaruhi pola pendidikan seseorang. Pengaruh itu bisa dari teman sebaya maupun beda usia. Rasulullah memberikan peringatan dini agar kita selektif dalam memilih lingkungan bergaul, jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif. Pergaulan dengan lingkungan terbagi atas dua yakni: pertama, kita yang mempengaruhi lingkungan; kedua, kita yang dipengaruhi lingkungan.

⁸ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 50.

⁹ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 72.

¹⁰ Binti Maunah, *Landasan Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 124-125.

Lingkungan di mana proses pendidikan berlangsung, misalnya lingkungan dalam satu lembaga pendidikan yang agamis, karena lingkungan juga akan memberikan pengaruh kepada anak didik tersebut. Apalagi kalau anak itu nanti juga bergaul dalam lingkungan masyarakat. Pengaruh lingkungan terhadap anak dapat positif dan dapat pula negatif. Positif apabila lingkungan memberikan dorongan terhadap proses pendidikan untuk berhasil, dan dikatakan negatif apabila lingkungan menghambat pendidikan yang ada. Adapun wujud dari pada *milliu* antara lain :

- 1) Tempat tinggal
- 2) Teman bermain
- 3) Buku bacaan (majalah-majalah)
- 4) Macam kesenian (bioskop, wayang, ketoprak, ludruk dan sebagainya) dan lain-lain.¹¹

Pembinaan lingkungan keluarga dilakukan pertama kali oleh ayah terhadap anak-anaknya, suami terhadap istrinya. Ayah harus menjadi pemimpin yang bijaksana dan menjunjung tinggi asas demokrasi dalam keluarga. Ayah harus menjadi teladan dalam keluarga. Adapun istri sebagai ibu berkewajiban membina dan mendidik anak-anak, dengan memberi contoh yang baik, misalnya berbicara dengan santun dan bahasa yang lemah lembut, sabar dan telaten dalam dalam mengurus anak. Demikian pula, dengan anak-anak, diwajibkan taat dan patuh kepada orang tua, sehingga apabila kondisi rumah tangga telah dibina dengan baik, lingkungan

¹¹ Binti Maunah, *Landasan Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 126.

keluargapun terbina dengan baik.¹² Jadi dilingkunganlah individu memulai mengeksplorasi dunianya, mulai belajar menangkap fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitarnya dan mempelajarinya dengan baik yang nantinya akan digunakan dimana saja kapan saja saat berada di lingkungan yang baru.

B. Karakter

1. Pengertian

Karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang dengannya membentuk karakter psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Berbagai definisi istilah atau dari karakter itu sendiri. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "*to mark*" (menandai) dan memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.

Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara seorang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) seseorang. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral.¹³

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun yang dimaksud berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku,

¹² Tatang S, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),155.

¹³ Zubaedi, "*Desain Pendidikan Karakter*", (Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup,2012,Cet.2) hlm. 12

bersifat, bertabiat, dan berwatak. Sebagian menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas moral dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya mengubah atau membentuk karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap intelektual seseorang. Coon mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat di terima oleh masyarakat. Karakter berarti tabiat atau kepribadian.

Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah di kuasai secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Dalam tulisan bertajuk *Urgensi Pendidikan Karakter*, Prof. Suyanto, Ph.D. menjelaskan bahwa "karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara".

Dalam istilah psikologi, yang disebut karakter adalah watak perangai sifat dasar yang khas satu sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi.¹⁴ Jadi karakter adalah seperangkat sifat yang melekat di individu yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan kematangan moral kebajikan yang ada dalam individu.

¹⁴ Ramayulis, *"Ilmu Pendidikan Islam"*, (Jakarta : Kalam Mulia Group, 2012, Cet.9) hlm. 510.

2. Faktor-faktor pembentukan karakter

Menurut Gunawan, faktor-faktor pembentuk karakter dibedakan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor internal

Terdapat 5 hal yang termasuk dalam faktor intern yang dapat mempengaruhi karakter, yaitu:

1) Insting atau naluri

Insting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tidak didahului latihan perbuatan itu. Sedangkan naluri merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli. Maka perbuatan seseorang dapat bersumber dari latihan-latihan ataupun pembawaan.

2) Adat atau kebiasaan

Yang dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan. Maka dapat dipahami bahwa dengan melakukan pengulangan secara terus-menerus suatu perilaku maka perilaku tersebut¹⁵ bisa menjadi bagian atau kebiasaan dirinya.¹⁶ Kehendak/kemauan. Kemauan adalah kemauan untuk melangsungkan segala ide dan segala yang dimaksud, walau disertai berbagai rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-sekali tidak

¹⁵ Heri Gunawan, (*Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*), hlm. 18.

¹⁶ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, 20.

mau tunduk kepada rintangan tersebut. Manfaat dari sebuah kehendak atau kemauan yaitu dapat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, terutama dalam keinginan untuk berperilaku baik, perlu didorong agar terwujud.

3) Suara batin atau suara hati

Suara hati berfungsi memperingatkan bahaya berbuat buruk dan berusaha mencegahnya, disamping dorongan untuk melakukan hal baik. Dalam diri manusia terhadap suara batin yang dapat membuat keputusan untuk melakukan kebaikan, dan menghindari perbuatan yang buruk.

4) Keturunan

Keturunan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia. Dalam keturunan terdapat dua jenis hal yang dapat diturunkan orang tua kepada kedua anaknya, yaitu sifat jasmaniyah yaitu kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat saraf orang tua yang dapat diwariskan kepada anaknya dan selanjutnya sifat ruhaniyah yaitu lemah dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku anak cucunya.

b. Faktor eksternal

1) Pendidikan

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter. Pendidikan untuk mematangkan kepribadian manusia sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan yang telah

diterima oleh orang baik pendidikan formal, informal maupun nonformal.¹⁷

Pendidikan digunakan sebagai sarana atau tempat latihan dan memperoleh informasi mengenai karakter, sehingga dianggap penting jika pendidikan dijadikan sara pembentuk karakter.

2) Lingkungan

Lingkungan adalah suatu yang melingkungi suatu tubuh yang hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan pergaulan hidup manusia yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. Kemudian lingkungan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, lingkungan yang bersifat kebendaan. Alam yang melingkungi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. Misalnya lingkungan fisik sekitar seperti lingkungan alam yaitu unsur abiotik dan biotik, yang kecuali manusia. Kedua, lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat membentuk kepribadiannya menjadi baik.¹⁸ Jadi dapat dipahami bahwa dengan menentukan secara benar tempat atau lingkungan hidup dapat menentukan kepribadian atau karakter yang akan dimunculkan.

3. Pendidikan karakter

Menurut Samami, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.¹⁹ Pada pemerintah Indonesia sendiri, yang dituangkan pada Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter

¹⁷ Heri Gunawan, (*Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*), hlm. 21.

¹⁸ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi* 30

¹⁹ Muchlas Samami, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, 45.

(RANPK) menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat dimaknai dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.²⁰ Menurut Elkind dan Sweet dalam Gunawan, mendefinisikan pendidikan karakter yaitu upaya yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli dan inti atas nilai-nilai etis/susila.²¹

Menurut Scerenko dalam Samami, pendidikan karakter adalah upaya yang sungguh-sungguh dengan cara mana ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah, dan biografi para bijak dan pemikiran besar), serta praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang diamati dan dipelajari).²²

Menurut Ratna Megawangi dalam Wiyani, pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.²³ Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk menanamkan karakter budi yang luhur yang baik pada diri individu yang bertujuan lebih memahami nilai-nilai etis kemanusiaan yang sesuai dengan norma perilaku sosial yang ada di masyarakat melalui berbagai metode agar kelak dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar.

²⁰ Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*, 5-6

²¹ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, 23.

²² Muchlas Samami, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, 45.

²³ Novan ardy Wiyani, *Membumikan Pendidikan Karakter di SD*, 26.

C. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai Dengan Perkembangan Zaman

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka.

Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya.²⁴

²⁴ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 13

Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali, jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara.²⁵ Hampir dapat dipastikan, negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis, mengalami kehancuran secara ideologis. Dalam arti, negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya, ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.²⁶

Jadi sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila merupakan pedoman ciri khas atau identitas bangsa Indonesia, ideologi Pancasila sebagai konsep pengetahuan

²⁵ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 14.

²⁶ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 14-16.

dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan tentang makna hidup, bagaimana manusia harus hidup dan bertindak yang dapat memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan sosial masyarakat yang ada.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nilai ketuhanan dalam Pancasila, sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam semesta. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dibuktikan dengan pemelukkan salah satu agama yang diakui negara tau menganut aliran kepercayaan tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri senantiasa hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong menolong antarsesama manusia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, antargolongan, maupun antar bangsa.
3. Nilai persatuan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Setiap warga negara, terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.²⁷ Oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan

²⁷ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 17

itu sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya.

4. Nilai kerakyatan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan.
5. Nilai keadilan dalam Pancasila, diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara, dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain.²⁸

Penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, Pancasila bersumber pada pandangan hidup falsafah berbangsa dan bernegara sehingga dapat memenuhi persyaratan menjadi ideologi negara yang terbuka. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah akan tetapi pelaksanaannya disesuaikan akan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kurunnya waktu yang terjadi. Hal ini dimaksudkan bahwasannya nilai yang terkandung di dalam Pancasila menegaskan bahwa ideologi yang terkandung di dalamnya bersifat aktual, dinamis yang nantinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi zaman yang ada, serta dinamika perkembangan di dalam masyarakat itu sendiri. Ideologi Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam aspek berbagai bidang apapun yang ada di kehidupan

²⁸ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 17

masyarakat yang nantinya dapat mengetahui ke arah mana mereka membangun kehidupan bernegara yang sejahtera.

Pada zaman sekarang nilai-nilai Pancasila terutama pada generasi muda akan lebih dikuatkan dengan kurikulum merdeka berupa profil pelajar Pancasila²⁹ yang meliputi enam dimensi yaitu:

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME. dan berakhlak mulia,
 - a. Akhlak beragama
 - b. Akhlak pribadi
 - c. Akhlak kepada manusia
 - d. Akhlak kepada alam
 - e. Akhlak bernegara
2. Berkebhinekaan global
 - a. Mengenal dan menghargai budaya
 - b. Komunikasi dan interaksi antar budaya
 - c. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan
 - d. Berkeadilan Sosial
3. Dimensi gotong royong
 - a. Kolaborasi
 - b. Kepedulian
 - c. Berbagi
4. Dimensi mandiri
 - a. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi
 - b. Regulasi diri

²⁹ Anindito Aditomo, Kemendikbud *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan* (Jakarta 2022) Hal. 2

5. Dimensi bernalar kritis
 - a. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
 - b. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran
 - c. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri
6. Dimensi kreatif
 - a. Menghasilkan gagasan yang orisinal
 - b. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal
 - c. Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan³⁰

D. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan

1. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum

Perkembangan bidang politik, meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara, dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini, haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi

³⁰ Anindito Aditomo, Kemendikbud *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan* (Jakarta 2022) Hal. 2-32

manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹

Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin, sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. pemilihan ketua Sis secara langsung

Pembangunan dalam bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai

³¹ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 22

Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.³²

2. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Ekonomi

Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut.

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua

³² Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 23

lembaga perekonomian tersebut, dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.³³

3. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya

Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita, selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti "westernisasi", namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah, dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila.³⁴

³³ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 23

³⁴ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 24

Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa.

4. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan, secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara.³⁵

Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah, juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Pada saat ini, terdapat beberapa organisasi keamanan yang dibentuk

³⁵ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 24

secara sengaja dan terorganisasi secara modern, seperti pertahanan sipil, satuan pengaman lingkungan, dan sebagainya.³⁶

Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang telah membuktikan kepada masyarakat luas bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa yang dapat membuat perubahan dinamika perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Pancasila bukanlah ideologi tertutup, yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada.

Pancasila mampu menampung pemikiran-pemikiran yang baru untuk merubah mengikuti dengan perkembangan era yang ada dan tidak bersifat kaku. Keterbukaan ideologi nilai-nilai Pancasila merupakan sebagai salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia terutama untuk generasi muda, adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, akan tetapi kita sebagai warga negara tetap menghayati dan mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari.

³⁶ Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna, *Putra Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018) Hal 21-25

